

Peran *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance* dengan *Board Gender Diversity* sebagai Variabel Pemoderasi

Pande Kadek Vina Febrianti¹, Yuniarwati^{2*}

^{1,2}Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Tarumanagara
pandekdvina@gmail.com, yuniarwati@fe.untar.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: May 11, 2026

Accepted: Jun 1, 2026

Published: Oct 1, 2026

ABSTRACT

This study is intended to investigate and evaluate the influence of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles on tax avoidance practices among companies operating in the coal production sub-industry within the energy sector that are listed on the Indonesia Stock Exchange, covering the observation period from 2022 to 2024, while also taking into account the role of board-level gender diversity as a moderating variable in that relationship. This study is driven by the critical role that tax revenues play in supporting government financing, alongside the persistent indications of tax avoidance behavior, particularly within sectors that make substantial contributions to corporate income tax receipts. Simultaneously, the growing emphasis on ESG principles has encouraged corporations to operate with greater transparency and accountability across all aspects of their business conduct, including matters related to taxation. Furthermore, the presence of gender diversity within a company's board of directors is regarded as a factor capable of elevating the quality of both decision-making processes and supervisory functions, which in turn may have a meaningful bearing on a company's inclination to engage in tax avoidance practices. Panel data regression analysis was employed in this study with support from Stata to evaluate the association among variables, including the influence of the moderating variable on the proposed relationship under study. Overall, the results indicate that although ESG does not directly affect tax avoidance, the presence of women on the board of directors significantly alters the relationship by weakening the effect of ESG on tax avoidance practices

Keywords: Board Gender Diversity; Energy Sector; ESG; Moderating Analysis; Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak menjadi kontributor pemasukan utama bagi APBN Indonesia dalam rangka mencapai tujuan nasional (Purnamawati et al., 2023). Mengingat pentingnya manfaat pajak bagi suatu negara, maka penerimaan pajak menjadi komponen strategis yang menentukan kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2024 hanya mencapai 97,2% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.988,88 triliun, meninggalkan *shortfall* sebesar Rp56,5 triliun, menjadi *shortfall* pertama kali dalam empat tahun terakhir (Rachman, 2025b), seperti tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 4 Tahun Terakhir

Tahun	Target (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi (dalam Triliun Rupiah)	Persentase
2021	1.229,6	1.278,6	103,99
2022	1.485	1.716,8	115,61



2023	1.818,2	1.869,2	102,80
2024	1.988,88	1.932,4	97,16

Sumber: Rachman (2025)

Perlambatan penerimaan PPh Badan tahun 2024 diatribusikan pada merosotnya kontribusi fiskal sektor industri ekstraktif, yakni pertambangan batu bara, nikel, dan kelapa sawit, yang selama ini menjadi penopang utama penerimaan pajak korporasi nasional (Azzahra, 2025). Tren penurunan penerimaan pajak 2024 juga terbawa hingga semester I tahun 2025. Realisasi pada Semester I/2025 turun 6,21% dibanding periode yang sama di tahun 2024 (Wildan, 2025). Penurunan penerimaan hingga semester I tahun 2025 ini menjadi sinyal terjadinya *shortfall* di tahun 2025 (Rachman, 2025a). Potensi kehilangan sumber penerimaan dari pajak juga dilaporkan oleh Tax Justice Network. Laporan Tax Justice Network mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia mengalami potensi kehilangan pajak sebesar USD 2,981 juta, ditambah kerugian sekitar USD 60,5 juta akibat praktik pelarian aset ke luar negeri (Ovonji-Odida, 2024).

Di tengah tekanan fiskal tersebut, *tax avoidance* menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji. Penghindaran pajak telah berdampak signifikan terhadap lanskap sosial global (Kovermann & Velte, 2021), karena secara luas dianggap sebagai bentuk perilaku yang kurang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan, melemahkan kepatuhan, etika, dan kepercayaan masyarakat (Bird & Davis-Nozemack, 2018). Pada titik inilah Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi relevan sebagai kerangka analisis. Secara konseptual, ESG telah berkembang melampaui sekadar pelaporan keberlanjutan dan kini dipandang sebagai cerminan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, termasuk kepatuhan pajak (Yoon et al., 2021). Hal ini sejalan dengan pandangan *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa perusahaan harus beroperasi dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas, bukan hanya pemegang saham (Ouni et al., 2020). Dari sisi *legitimacy theory*, pengungkapan ESG berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial, di mana perusahaan berupaya membangun persepsi publik yang positif agar tetap diterima dalam lingkungan eksternalnya (Elgharabawy & Aladwey, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu memberikan hasil yang beragam mengenai hubungan antara ESG dengan *tax avoidance*. Kovermann & Velte (2021), menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif secara umum antara CSR dan penghindaran pajak. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan di perusahaan Korea selama tahun 2011-2017 juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara skor ESG dan penghindaran pajak (Yoon et al., 2021). Pengungkapan pembayaran pajak dalam laporan keberlanjutan berbasis GRI dapat menekan agresivitas praktik penghindaran pajak (Rudyanto, 2025). Realisasi dan pengungkapan CSR yang optimal dapat membentuk citra baik perusahaan di mata masyarakat, sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan *tax avoidance* agar reputasi positifnya tetap terjaga (Stefanie Lucy Wirawan & Yuniarwati, 2022). Berbeda dengan penelitian tersebut, Benlemlih et al. (2023) dan Jiang et al., (2022) justru menuliskan adanya hubungan positif antara CSR dan *Corporate Tax Avoidance* (CTA). Pengungkapan CSR secara mandatori mengubah perilaku perusahaan dan menciptakan eksternalitas positif bagi masyarakat, namun dengan mengorbankan pembayaran pajak kepada pemerintah (Jiang et al., 2022).

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menguraikan sejauh mana kinerja ESG memberikan dampak terhadap praktik *tax avoidance*, dengan mengikutsertakan keberagaman gender dalam jajaran dewan (*board gender diversity*) sebagai variabel yang berperan dalam memoderasi hubungan tersebut mengingat keberagaman gender dalam dewan direksi dikaitkan dengan peningkatan kualitas pengawasan, sensitivitas terhadap risiko reputasi, dan orientasi etis yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan strategis (Elgharabawy & Aladwey, 2025). Dalam perspektif teori stakeholder, direktur perempuan cenderung lebih mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sehingga berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara komitmen ESG dan perilaku *tax avoidance* perusahaan.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan subindustri produksi batu bara yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Pemilihan subindustri ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, industri batu bara memiliki eksposur langsung terhadap isu lingkungan dan sosial yang menjadi inti penerapan ESG, sehingga relevansi pengungkapan ESG terhadap perilaku korporasi pada industri ini sangat tinggi. Kedua, subindustri ini merupakan kontributor dominan dalam penurunan PPh Badan tahun 2024 (Azzahra, 2025), menjadikannya objek yang strategis untuk menginvestigasi keterkaitan antara praktik ESG dan perilaku penghindaran pajak. Periode 2022–2024 dipilih sebagai momentum penting seiring dengan dorongan regulasi OJK terkait kewajiban sustainability reporting bagi emiten di BEI.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris yang secara bersamaan mengintegrasikan ESG, *tax avoidance*, dan *board gender diversity* dalam satu model moderasi, khususnya pada konteks industri ekstraktif di negara berkembang. Penelitian diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dalam menguji apakah ESG berfungsi secara substantif sebagai mekanisme tata kelola yang mendorong kepatuhan pajak, ataukah sekadar simbolik sebagai instrumen legitimasi tanpa perubahan perilaku pajak yang nyata. Secara praktis, temuan ini diharapkan memberikan dasar empiris bagi regulator dalam mengevaluasi kualitas ESG disclosure dan merancang kebijakan tata kelola gender yang melampaui sekadar pemenuhan kuota representasi menuju penguatan pengawasan korporasi yang substantif..

STUDI LITERATUR

Legitimacy Theory

Teori ini berpendapat bahwa organisasi beroperasi dengan cara yang sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat untuk mempertahankan legitimasi dalam lingkungan eksternalnya (Elgharabawy & Aladwey, 2025). Teori Legitimasi menyarankan bahwa perusahaan yang menunjukkan capaian ESG tinggi lebih mungkin mencari legitimasi dengan menyelaraskan tindakan mereka dengan standar masyarakat mengenai keadilan, tanggung jawab etis, dan keberlanjutan. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG secara konsisten umumnya memiliki kecenderungan untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif, karena praktik tersebut berisiko merusak legitimasi dan reputasi mereka di hadapan pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah, aktivis, dan kelompok sosial (Elgharabawy & Aladwey, 2025).

Stakeholder Theory

Teori pemangku kepentingan memperluas cakupan kepentingan dengan memasukkan selain kepentingan pemegang saham (perspektif finansial), juga kepentingan kontraktor lain (perspektif kemitraan), seperti karyawan dan masyarakat (Ouni et al., 2020). Dalam pelaporan keberlanjutan, dewan yang beragam jauh lebih baik dalam mengawasi dan memantau pelaporan nonkeuangan informasi suatu perusahaan, karena keberagaman akan meningkatkan kualitas keputusan strategis perusahaan dan mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (Michelon & Parbonetti, 2012). Memiliki keberagaman gender di dewan akan menghasilkan keputusan yang seimbang karena perempuan memiliki pemikiran yang berbeda dari laki-laki, selain itu, mereka lebih sensitif terhadap isu-isu keberlanjutan, lebih empati terhadap masyarakat dan lebih memperhatikan pemangku kepentingan khususnya seperti masyarakat, karyawan dan lingkungan hidup (Bakar et al., 2019).

Legal Realism Theory

Menurut teori realisme hukum (legal realism theory), hukum terdiri atas *hard law* dan *soft law*. *Hard law* memiliki sanksi dan peraturan yang bersifat konkret (Shaffer dan Pollack, 2010 dalam Rudyanto, 2025), sedangkan *soft law* tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat (Christians, 2007 dalam Rudyanto, 2025). Laporan keberlanjutan berbasis Global Reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu mekanisme *soft law*, karena mendorong perusahaan untuk melaporkan pembayaran pajaknya secara transparan. Namun, mekanisme ini hanya mendorong kepatuhan terhadap *hard law*, bukan berkontribusi langsung pada pengembangan *hard law* (Rudyanto, 2025).

Tax Avoidance

Tax Avoidance dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan pengurangan pajak (Dyrenge et al.,

2019) yang merupakan bagian dari perencanaan pajak (Kalalo & Watulingas, 2022), *Tax avoidance* terjadi apabila wajib pajak memanfaatkan kelemahan dalam aturan perpajakan yang berlaku (Yusiana & Yuniarwati, 2023). Di sisi lain, *tax evasion* dianggap ilegal, sedangkan *tax avoidance* dianggap lebih positif dan bermoral karena upaya untuk menghemat pajak dilakukan melalui prosedur atau tindakan yang benar Kirchler et al, 2008 dalam Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Tax Avoidance dalam beberapa penelitian dapat diukur melalui GAAP ETR (*Tax Expense/Pre-tax Income*) dan Cash ETR (*Cash Taxes Paid/(Pre-tax Income – Special Items)*). Meskipun BTD memiliki keterbatasan karena perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal tidak selalu mencerminkan praktik *tax avoidance*, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan temporer dan permanen yang timbul akibat perbedaan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, namun BTD merupakan pengukuran yang paling umum digunakan karena secara langsung mengukur kecenderungan penghindaran pajak dengan membandingkan jumlah laba bersih dan pendapatan kena pajak secara intuitif (Yoon et al., 2021).

Environmental, Social, and Governance (ESG)

Inisiatif ESG berawal dari dorongan etis untuk meningkatkan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan dan sosial (Yoon et al., 2021). Mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan mengandalkan informasi berkelanjutan untuk menciptakan persepsi positif di mata publik dan di kalangan pemangku kepentingannya (Buallay et al., 2020). Pengungkapan aktivitas ESG yang dilakukan secara konsisten oleh perusahaan dapat menjadi indikator adanya komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan transparan, sehingga perusahaan cenderung mengurangi peluang terjadinya tindakan ilegal oleh manajemen serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan (Kolsi et al., 2023).

Pedoman pelaporan keberlanjutan yang umum digunakan adalah berdasarkan standar GRI (*Global Reporting Index*). GRI Standards menyediakan data mengenai sejauh mana organisasi berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, baik dalam aspek positif maupun negatif melalui tiga rangkaian standar pelaporan yang saling melengkapi, yakni Standar Universal GRI yang dirancang untuk diterapkan secara menyeluruh oleh semua jenis organisasi tanpa terkecuali; Standar Sektor GRI yang penerapannya bersifat spesifik dan hanya diperuntukkan bagi sektor-sektor tertentu sesuai dengan karakteristik industrinya; serta Standar Topik GRI yang masing-masing memuat pedoman pengungkapan secara rinci dan relevan berdasarkan topik-topik pelaporan yang spesifik (Global Reporting, 2021).

Indikator ESG terdiri atas aspek *environmental*, *social*, dan *governance* dengan total item pengungkapan dalam laporan keberlanjutan yang disesuaikan dengan standar GRI yang relevan. Penilaian dilakukan menggunakan skala *dummy*, yaitu skor 1 diberikan apabila perusahaan mengungkapkan item tertentu dan skor 0 apabila tidak mengungkapkannya. Seluruh item diberikan bobot yang sama, kemudian total skor pengungkapan dibagi dengan jumlah item pengungkapan untuk memperoleh nilai indeks ESG perusahaan. Dalam perspektif perpajakan, pengungkapan yang disebutkan dalam GRI Standard seperti pengungkapan pendapatan pajak, tata kelola dan manajemen risiko pajak, serta laporan per negara yang termuat dalam GRI 207.

Board Gender Diversity

Isu mengenai keberagaman dewan telah menjadi perhatian di beberapa negara, misalnya banyak negara Eropa yang telah menerbitkan pembuatan undang-undang wajib memiliki direktur perempuan (Singh & Dwesar, 2022). Walaupun terkadang keberagaman dewan dapat menimbulkan adanya perselisihan yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan, namun dewan yang lebih beragam diharapkan mampu melakukan analisis dan pemrosesan informasi yang lebih baik karena mempunyai pengetahuan dan keahlian yang lebih mendalam dan luas (Dong et al., 2023). Dewan direksi yang beragam secara gender cenderung memprioritaskan pengambilan keputusan yang etis, sehingga mendorong praktik perpajakan yang lebih bertanggung jawab dan menghindari penghindaran pajak yang agresif (Elgharabawy & Aladwey, 2025).

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Jurnal (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bohyun Yoon, Jeong-Hwan Lee, dan Jin-Hyung Cho	Sustainability (2021)	<i>The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance—Evidence from Korea</i>	Relasi negatif yang terjalin antara skor ESG dan praktik penghindaran pajak mencerminkan kecenderungan perusahaan yang berkomitmen pada nilai-nilai ESG untuk lebih cermat dalam pengambilan keputusan perpajakan, sebab tereksposnya aktivitas tax avoidance dapat berdampak signifikan terhadap penurunan citra dan reputasi sosial perusahaan
2.	Stefanie Lucy Wirawan & Yuniarwati	Jurnal Ekonomi (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia	Perusahaan yang konsisten dalam melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR cenderung memiliki legitimasi sosial yang baik di masyarakat, sehingga perusahaan akan menghindari praktik penghindaran pajak demi mempertahankan citra positif tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh tanpa melakukan <i>tax avoidance</i> .
3.	Wei Jiang, Cheng Zhang, dan Chengyu Si	Technological Forecasting & Social Change (2022)	<i>The real effect of mandatory CSR disclosure: Evidence of corporate tax avoidance</i>	Menyimpulkan hubungan positif antara CSR dan <i>Corporate Tax Avoidance</i> (CTA). Pengungkapan CSR secara mandatori mengubah perilaku perusahaan dan menciptakan eksternalitas positif bagi masyarakat, namun dengan mengorbankan pembayaran pajak kepada pemerintah. Perusahaan mungkin melakukan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengimbangi beban keuangan yang timbul akibat kewajiban pengungkapan CSR.
4.	Maria Mitroulia, Evangelos Chytis, Thomas Kitsantas, Michalis Skordoulis, Petros Kalantonis	Journal of Risk and Financial Management (2025)	<i>ESG Strategy and Tax Avoidance: Insights from a Meta-Regression Analysis</i>	Temuan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara strategi ESG dan <i>tax avoidance</i> atau hanya kecil hingga moderat, yang mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung memisahkan strategi ESG dari praktik penghindaran pajak. Tidak ditemukannya korelasi yang signifikan secara statistik ini dapat mencerminkan adanya kesenjangan antara perilaku pajak perusahaan

No	Nama Peneliti	Jurnal (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
				yang sebenarnya dengan komunikasi atau sinyal institusional yang terkait dengan inisiatif ESG.
5.	Adel Elgharabawy dan Laila Mohamed Alshawadfy Aladwey	Journal of Financial Reporting and Accounting (2025)	<i>ESG performance, board diversity and tax avoidance: empirical evidence from the UK</i>	Dewan dengan keberagaman gender cenderung memprioritaskan pengambilan keputusan yang etis, sehingga mendorong praktik perpajakan yang lebih bertanggung jawab dan mengurangi penghindaran pajak yang agresif
6.	Mohammadreza Hoseini dan Mahdi Safari Gerayli	International Journal of Finance and Managerial Accounting (2018)	<i>The Presence of Women on the Board and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange</i>	Perempuan dianggap mengurangi penghindaran pajak karena mereka menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan manajer serta meningkatkan tingkat kepercayaan di antara pemegang saham.
7.	Dewi Paskah Sibuea, Cynthia Afriani	International Journal of Business Studies (2025)	<i>Linking ESG to Tax Avoidance: Do Women Directors Matter?</i>	Keberadaan direktur perempuan tidak memoderasi hubungan ESG dengan <i>tax avoidance</i> . Meskipun keberagaman gender itu penting, keberadaan direktur perempuan saja tidak cukup untuk berfungsi sebagai variabel moderator dalam hubungan antara ESG dan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, upaya mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan yang beretika, inklusif, dan akuntabel tidak hanya didasarkan pada peningkatan proporsi perempuan dalam struktur organisasi, namun memerlukan penguatan kapasitas pengaruh mereka secara substantif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

Sumber : Data diolah, 2026

Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh *Environmental, Social, and Governance (ESG)* terhadap *Tax Avoidance*

Pengungkapan pembayaran pajak dalam laporan keberlanjutan berbasis GRI dapat menekan agresivitas praktik penghindaran pajak (Rudyanto, 2025). Dalam kerangka *Legal Realism Theory*, pelaporan ESG berbasis GRI dikategorikan sebagai mekanisme *soft law* yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (Christians, 2007 dalam Rudyanto, 2025). Sebagai *soft law*, mekanisme ini hanya mendorong kepatuhan perusahaan terhadap *hard law* yang berlaku, tanpa berkontribusi langsung pada pengembangan *hard law* itu sendiri (Rudyanto, 2025). Meskipun demikian, tekanan normatif yang ditimbulkan oleh *soft law* tetap mampu membentuk perilaku perusahaan melalui ekspektasi pemangku kepentingan dan risiko reputasi yang menyertainya. Jika dikaitkan dengan dari *Legitimacy Theory*, perusahaan yang berfokus pada ESG menunjukkan tendensi untuk tidak mengadopsi strategi perpajakan yang bersifat agresif, karena praktik tersebut berisiko merusak legitimasi dan reputasi mereka di

hadapan pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah, aktivis, dan kelompok sosial (Elgharabawy & Aladwey, 2025). Hal serupa juga diungkapkan oleh Stefanie Lucy Wirawan & Yuniarwati, 2022 yang menyimpulkan perusahaan yang konsisten dalam melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR cenderung memiliki legitimasi sosial yang baik di masyarakat, sehingga perusahaan akan menghindari praktik penghindaran pajak demi mempertahankan citra positif tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh tanpa melakukan tax avoidance.

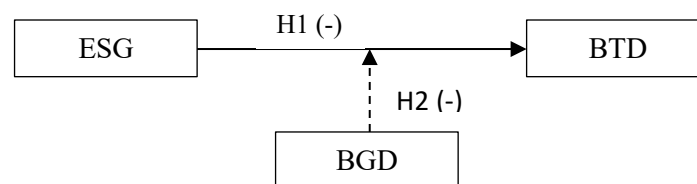
H1 : *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

b. *Board Gender Diversity* Memperkuat Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance*

Pengungkapan aktivitas ESG yang dilakukan secara konsisten oleh perusahaan dapat menjadi indikator adanya komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan transparan, sehingga perusahaan cenderung mengurangi peluang terjadinya tindakan ilegal oleh manajemen serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada para pemangku kepentingan (Kolsi et al., 2023). Perusahaan yang mengedepankan kebijakan ESG umumnya memiliki kecenderungan lebih rendah untuk terlibat aktif dalam penghindaran pajak yang agresif, karena praktik tersebut berisiko merusak legitimasi dan reputasi mereka di hadapan pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah, aktivis, dan kelompok sosial (Elgharabawy & Aladwey, 2025).

Sejalan dengan *Stakeholder Theory*, diversitas gender dalam struktur dewan direksi tidak hanya memperluas perspektif dalam proses pengambilan keputusan strategis, tetapi juga mempertegas komitmen perusahaan untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk transparansi dan kepatuhan perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang nyata. Kombinasi antara komitmen ESG yang kuat dan representasi perempuan yang memadai dalam dewan inilah yang secara bersama-sama membentuk mekanisme tata kelola yang lebih etis, inklusif, dan bertanggung jawab dalam mengendalikan praktik tax avoidance. Dalam konteks ini, dewan yang lebih beragam gender dapat memperkuat hubungan negatif antara ESG dan *tax avoidance*, karena nilai-nilai etika dan tanggung jawab yang lebih tinggi mendorong penerapan ESG yang lebih konsisten dan mengurangi kecenderungan manipulasi pajak.

H2 : *Board Gender Diversity* Memperkuat Pengaruh Negatif *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE

Populasi dan Sampel

Cakupan populasi merujuk pada semua perusahaan yang secara khusus diklasifikasikan berada dalam lingkup subindustri produksi batu bara pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang tahun 2022-2024. Subindustri ini dipilih berkaitan dengan eksposur langsung terhadap isu lingkungan dan sosial yang menjadi fokus dalam penerapan ESG. Selain itu, subindustri Produksi Batu Bara yang merupakan kelompok bidang usaha Pertambangan Batu Bara termasuk dalam sektor yang mendominasi indikasi penurunan PPh badan tahun 2024, sebagaimana

disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa melambatnya realisasi penerimaan PPh Badan di tahun 2024 sebagian besar berasal dari pertambangan batu bara, nikel, kelapa sawit (Azzahra, 2025). Sampel diperoleh sejumlah 54 sampel yang diambil melalui metode *purposive sampling*, sebagai berikut:

Tabel 3. Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Subindustri Produksi Batu Bara	25
Tidak mempublikasikan Laporan Keuangan audited	-3
Tidak mempublikasikan Laporan Keberlanjutan	-4
Tidak mempublikasikan Laporan Tahunan	0
Jumlah Akhir	18
Periode pengamatan (tahun)	3
Jumlah Sampel	54

Definisi Operasional Variabel

Tabel 4. Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran	Referensi
<i>Tax avoidance</i>	Berbagai kegiatan pengurangan pajak yang terjadi ketika terdapat celah <i>grey area</i> yang dapat dimaksimalkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya	$BTD = \frac{Y^s - Y^t}{Total\ Aset}$ BTD : Book Tax Different Ys : Laba Bersih Sebelum Pajak Yt : Penghasilan Kena Pajak	Elgharabawy & Aladwey (2025)
<i>ESG</i>	Pengungkapan informasi tentang ekonomi, sosial dan kegiatan lingkungan hidup karena berdampak pada masyarakat dan pemangku kepentingan di mana perusahaan beroperasi	$ESG = \frac{Total\ item\ diungkapkan}{Total\ item}$	Yoon et al., (2021)
<i>Board Gender Diversity</i>	Proporsi direktur perempuan, yang dihitung sebagai jumlah kehadiran direktur perempuan dibagi dengan total direktur	$BGD = \frac{Jumlah\ Direktur\ Perempuan}{Total\ Direktur}$	Elgharabawy & Aladwey (2025)
<i>ROA</i>	Efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menciptakan profit	$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$	Yoon et al., (2021)
<i>Leverage</i>	ejauh mana seluruh aset milik perusahaan dapat digunakan untuk membayar total utang	$LEV = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Aset}$	Elgharabawy & Aladwey (2025)

Penelitian ini mengikutsertakan variabel kontrol berupa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) serta *leverage*, guna mengendalikan potensi pengaruh faktor-faktor keuangan perusahaan terhadap hubungan antarvariabel dalam model penelitian. ROA merepresentasikan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, di mana entitas dengan profitabilitas tinggi umumnya memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan

pajak sebagai upaya meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Adapun leverage menggambarkan proporsi penggunaan utang dalam struktur permodalan perusahaan, di mana tingginya leverage berimplikasi pada besarnya beban bunga yang secara fiskal dapat difungsikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga turut memengaruhi kecenderungan *tax avoidance*. Dengan demikian, pengendalian terhadap kedua variabel tersebut dilakukan untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat atas pengaruh ESG terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan data panel yang selanjutnya diproses melalui aplikasi Stata sebagai alat analisis. Dalam rangka menguji hubungan antarvariabel yang diajukan pada hipotesis, penelitian menerapkan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan membentuk variabel interaksi antara variabel bebas dan variabel moderasi ke dalam persamaan regresi.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini memanfaatkan statistik deskriptif untuk menyajikan data, yakni dengan hasil analisis dalam berbagai bentuk visual seperti tabel, grafik, diagram lingkaran, dan pictogram, serta dilengkapi dengan perhitungan statistik seperti nilai median, modus, dan rata-rata sebagai alat bantu interpretasi data tanpa melakukan penarikan kesimpulan (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Melalui STATA, analisis deskriptif dapat divisualisasikan dalam bentuk histogram, tabel, atau grafik, yang memungkinkan visualisasi distribusi dan pemusatan data secara praktis dan cepat (Faisol & Sujianto, 2020).

2. Model Regresi Data Panel

a. Tes Pemilihan Model Terbaik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan pemilihan model estimasi yang paling tepat di antara tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan dilakukan melalui serangkaian uji, yaitu:

- 1) Uji Chow, untuk memilih antara CEM dan FEM, dengan kriteria apabila nilai probabilitas $F < 0,05$ maka FEM lebih tepat digunakan.
- 2) Uji Hausman, untuk memilih antara FEM dan REM, dengan kriteria apabila nilai probabilitas $\chi^2 < 0,05$ maka FEM lebih tepat digunakan.
- 3) Uji Lagrange Multiplier (LM), dilakukan apabila hasil Uji Chow mengarah pada CEM, untuk memilih antara CEM dan REM, dengan kriteria apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka REM lebih tepat digunakan

b. Uji Asumsi Klasik

- 1) Uji Normalitas, untuk menguji apakah residual model terdistribusi secara normal menggunakan uji Skewness/Kurtosis Test
- 2) Uji Multikolinearitas, untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi tinggi antar variabel independen, dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di mana nilai $VIF < 10$ mengindikasikan tidak terdapat masalah multikolinearitas.
- 3) Uji Heteroskedastisitas, untuk menguji apakah terdapat ketidakkonsistenan varians residual antar observasi menggunakan uji Breusch-Pagan. Jika $\text{Prob Chi}^2 > 0,05$ pada pengujian BreuschPagan/CookWeisberg, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
- 4) Uji Autokorelasi, untuk mendeteksi korelasi antar residual pada data panel menggunakan uji Wooldridge.

c. Uji *Godness of Fit*

1) Uji signifikansi parameter individual (Uji t)

Dalam penelitian ini, Uji t digunakan sebagai sarana untuk menilai dan mengukur besaran dampak yang diberikan oleh setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dalam kerangka model regresi yang telah dirancang dan

direkonstruksi dalam penelitian ini (Muhammad Syukron & Hafidz Muhammad Fahri, 2018).

2) Uji koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur proporsi perubahan pada variabel dependen yang dapat diterangkan oleh keragaman variabel independen yang diikutsertakan dalam model regresi yang dibangun dalam penelitian ini (Muhammad Syukron & Hafidz Muhammad Fahri, 2018).

d. Uji *Moderated Regression Analysis*

Dalam rangka menguji hubungan antarvariabel yang diajukan pada hipotesis, penelitian menerapkan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan membentuk variabel interaksi antara variabel bebas dan variabel moderasi ke dalam persamaan regresi. Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \alpha + \beta_1 ESG_{it} + \beta_2 BGD_{it} + \beta_3 ESG_{it} \times BGD_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \beta_5 LEV_{it} + \varepsilon_{it}$$

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
<i>BTD (Y)</i>	0,2329922	0,1985410	- 0,0665378	0,8069014
<i>ESG (X)</i>	0,6315869	0,234480	0,178862	0,8373980
<i>BGD (Z)</i>	0,1164262	0,124900	0,0	0,5000000
<i>ESGxBGD (XZ)</i>	0,0679179	0,0729237	0,0	0,1902439
<i>ROA (C1)</i>	0,2115175	0,167917	0,0077155	0,6172316
<i>LEV (C2)</i>	0,3874605	0,1465181	0,0276009	0,6816851

Sumber : Data diolah, 2026

Variabel BTD mencatatkan nilai *mean* sebesar 0,232992 dan standar deviasi 0,198541. Nilai rata-rata tersebut menggambarkan bahwa secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian memiliki diferensiasi antara laba akuntansi dan laba fiskal sebesar 23,3%. Besarnya standar deviasi mencerminkan tingginya heterogenitas *tax avoidance* di antara perusahaan-perusahaan yang diamati. Hasil analisis deskriptif pada variabel ESG menghasilkan nilai rata-rata 0,6315869 atau sebesar 63,16%, mengindikasikan bahwa secara keseluruhan perusahaan sampel telah memiliki komitmen pengungkapan ESG yang cukup memadai, kendati heterogenitas tingkat pengungkapan antarperusahaan masih tercermin dari besaran standar deviasi yang diperoleh. Sementara itu, nilai rata-rata pada variabel BDG menggambarkan bahwa rata-rata keterwakilan perempuan dalam jajaran dewan direksi perusahaan sampel hanya sekitar 11,64%, sehingga dapat diindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam jajaran dewan direksi perusahaan sektor keuangan masih tergolong rendah. Variabel interaksi ESG dan BGD mencatatkan rata-rata sebesar 0,0679179 dengan standar deviasi sebesar 0,0729237. Hasil perhitungan ini mengungkapkan bahwa hubungan antara praktik ESG dan keberagaman gender di tingkat *board of director* memang dapat diidentifikasi pada perusahaan-perusahaan sampel, kendati besaran interaksi tersebut masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.

Analisis Regresi Data Panel

a. Pemilihan Model Terbaik

Tabel 5. Hasil Uji Pemilihan Model Terbaik

Pengujian	Nilai Uji	Hasil
Uji Chow	0.0054	FEM lebih baik dibandingkan CEM
Uji Hausman	0.4886	REM lebih baik dibandingkan FEM
Uji LM	0.0084	REM lebih baik dibandingkan CEM

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijalankan, model yang paling sesuai dalam mengestimasi persamaan regresi guna menguji pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG) terhadap *Tax Avoidance* (BTD) dengan *Board Gender Diversity* (BGD) sebagai variabel pemoderasi adalah *Random Effect Model* (REM). Mengingat model terpilih dalam analisis ini adalah *Random Effect Model*, maka model regresi yang digunakan tidak diwajibkan untuk memenuhi seluruh persyaratan uji asumsi klasik sebagaimana yang berlaku pada pendekatan estimasi lainnya.

b. Uji Asumsi Klasik

Dalam model REM, uji asumsi yang wajib dipenuhi adalah uji multikolinieritas (Septianingsih, 2022). Hasil uji multikolinieritas telah dipenuhi dalam penelitian ini dengan hasil pada Tabel 6.

Tabel 6 Uji Multikolinieritas

Variable	VIF	1/VIF
XZ	9,37	0,106769
Z	8,4	0,118993
X	2,75	0,363502
C1	1,19	0,840191
C2	1,14	0,874038
Mean VIF	4,57	

Sumber: Data diolah, 2026

c. Uji Hipotesis

1) Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis 1

Variabel	Coef.	Std. Err.	z	P> z
X	-0.0261783	0.100308	-0.26	0.794
C1	0.823619	0.2148703	3.83	0.000
C2	0.1814119	0.1273802	1.42	0.154
cons	0.0050263	0.1017077	0.05	0.961
R Square				0.5769

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{BTD} = 0.0050263 - 0.0261783\text{ESG} + 0.823619\text{ROA} + 0.1814119\text{LEV} + \varepsilon$$

Pengujian secara statistik menghasilkan nilai P Value sebesar 0,794, yang secara empiris mengindikasikan bahwa pada tingkat keyakinan 95% atau taraf signifikansi 5%, variabel *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak terbukti menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, bukti statistik yang diperoleh tidak mampu mendukung hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa ESG memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis tersebut dinyatakan gagal diterima dalam penelitian ini. Koefisien determinasi (R Square) yang dihaikan menunjukkan angka 0,5769 mengindikasikan bahwa sebesar 57,69% variasi yang terjadi pada variabel *tax avoidance* mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam model penelitian ini. Adapun proporsi sisanya, yakni sebesar 42,31%, merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain yang berada di luar cakupan model dan tidak turut diperhitungkan dalam penelitian ini.

2) Pengaruh *Environmental, Social, and Governance* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Board Gender Diversity* sebagai Variabel Pemoderasi

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis 2

Variabel	Coef.	Std. Err.	z	P> z
X	0.2042952	0.1075241	1.90	0.057
Z	8.099841	4.508462	1.80	0.072
XZ	-2.077028	0.8002633	-2.60	0.009
C1	0.7559082	0.1970111	3.84	0.000
C2	0.3109407	0.1494153	2.08	0.037
cons	-0.1296389	0.1038431	-1.25	0.212
R Square				0.6342

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{BTD} = -0.1296389 + 0.2042952\text{ESG} + 8.099841\text{BGD} - 2.077028(\text{ESG} \times \text{BGD}) + 0.7559082\text{ROA} + 0.3109407\text{LEV} + \varepsilon$$

Hasil pengujian statistik menggambarkan nilai P Value sebesar 0,009, yang berarti bahwa pada taraf signifikansi 5%, *board gender diversity* terbukti memoderasi hubungan antara ESG dan *tax avoidance*. Arah koefisien yang bernilai negatif menggambarkan bahwa keberagaman gender dalam jajaran dewan direksi berperan sebagai moderator yang cenderung memperlemah keterkaitan antara ESG dan *tax avoidance*. Lebih lanjut, mengingat variabel ESG maupun *tax avoidance* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara langsung, maka *board gender diversity* dapat dikategorikan sebagai pure moderator dalam hubungan tersebut.

Berdasarkan temuan statistik yang diperoleh, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa "Board Gender Diversity Memperkuat Pengaruh Negatif Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Tax Avoidance" tidak berhasil didukung oleh data, sehingga hipotesis tersebut dinyatakan tidak diterima. Adapun nilai koefisien determinasi (R Square) menunjukkan angka 0,6342 mengindikasikan bahwa sekitar 63,42% variasi pada variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel ESG, *board gender diversity*, serta variabel interaksi antara keduanya yang diikutsertakan dalam model. Sementara itu, proporsi sisanya sebesar 36,58% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain yang berada di luar cakupan model penelitian ini

PEMBAHASAN

Pengaruh ESG terhadap Tax Avoidance

Temuan dalam penelitian ini mencerminkan bahwa tingkat pengungkapan ESG tidak memberikan dampak yang signifikan secara statistik terhadap kecenderungan *tax avoidance* pada perusahaan sampel. Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Yoon et al. (2021) yang menegaskan hubungan negatif antara skor ESG dan penghindaran pajak. Penghindaran pajak sangat terkait dengan pentingnya reputasi sosial dalam penentuan kebijakan perusahaan, karena apabila praktik tersebut terungkap ke publik, hal itu dapat merusak citra perusahaan (Yoon et al., 2021). Perbedaan hasil penelitian ini berpotensi dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan karakteristik industri di luar Indonesia yang berbeda secara fundamental.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Mitroulia et al. (2025) dan Mayberry & Watson, (2021). Mayberry & Watson (2021) berargumen bahwa perusahaan cenderung memisahkan CSR dari kebijakan pajaknya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Mitroulia et al., (2025) yang menyebutkan upaya ESG kemungkinan lebih bersifat simbolis atau sebagai sarana komunikasi dibandingkan memberikan dampak langsung terhadap praktik penghindaran pajak. Tidak ditemukannya korelasi yang signifikan secara statistik ini dapat mencerminkan adanya kesenjangan antara perilaku pajak perusahaan yang sebenarnya dengan komunikasi atau sinyal institusional yang terkait dengan inisiatif ESG. Kondisi tersebut juga terlihat dari hasil statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata pengungkapan ESG perusahaan sebesar 63%, yang mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan pengungkapan ESG pada tingkat yang relatif cukup tinggi. Namun demikian, kualitas pengungkapan tersebut masih didominasi oleh informasi

yang bersifat naratif dan *compliance-based*, yaitu lebih berfokus pada pemenuhan standar pelaporan keberlanjutan.

Penelitian ini menghasilkan bukti empiris yang mencerminkan bahwa keterbukaan informasi ESG tidak memiliki pengaruh yang dapat dianggap signifikan secara statistik dalam memengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan yang menjadi subjek pengamatan. Ketidadaan korelasi yang signifikan ini dapat mencerminkan adanya kesenjangan antara perilaku pajak perusahaan yang sebenarnya dengan komunikasi atau sinyal institusional yang terkait dengan inisiatif ESG. *Legitimacy Theory* berpendapat bahwa organisasi beroperasi dengan cara yang sesuai dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat untuk mempertahankan legitimasi dalam lingkungan eksternalnya (Elgharabawy & Aladwey, 2025). Dalam perspektif *Legitimacy Theory*, perusahaan cenderung menggunakan ESG sebagai alat komunikasi simbolik untuk membangun citra positif tanpa diikuti perubahan substantif dalam praktik perpajakan, sehingga pengungkapan dan strategi ESG yang ada belum tentu menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku pajaknya dan lebih bersifat simbolis dibandingkan memberikan dampak langsung terhadap praktik *tax avoidance*, yang mana kondisi ini sejalan dengan *Legal Realism Theory* di mana *soft law* hanya mendorong kepatuhan terhadap *hard law* yang sudah ada tanpa berkontribusi pada perubahan perilaku substantif perusahaan.

Return on Assets (ROA) terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kecenderungannya untuk melakukan *tax avoidance*. Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa perusahaan dengan laba yang lebih tinggi menanggung beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong manajemen untuk mengupayakan penghematan pajak secara lebih agresif. Sebaliknya, variabel leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga proporsi utang dalam struktur modal tidak terbukti memengaruhi perilaku penghindaran pajak pada sampel penelitian ini.

Pengaruh ESG terhadap *Tax Avoidance* dengan *Board Gender Diversity* sebagai Pemoderasi

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa representasi perempuan dalam jajaran dewan direksi tidak memperkuat, melainkan justru mengurangi kekuatan relasi antara pengungkapan ESG dan praktik penghindaran pajak. Peningkatan proporsi anggota dewan perempuan berimplikasi pada semakin melemahnya hubungan antara komitmen ESG dan perilaku *tax avoidance* perusahaan. Namun demikian, karena ESG tidak memiliki pengaruh langsung terhadap *tax avoidance*, maka peran moderasi *board gender diversity* lebih bersifat memperlemah hubungan yang sudah tidak signifikan. Hasil ini mencerminkan bahwa diversitas gender dalam struktur dewan direksi lebih signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pengambilan keputusan serta penguatan konsistensi etika korporasi secara menyeluruh, ketimbang berperan sebagai faktor yang mempertegas efektivitas ESG dalam fungsinya sebagai instrumen pengendalian *tax avoidance*.

Direksi perempuan cenderung lebih sensitif terhadap risiko reputasi dan kepatuhan, termasuk dalam hal perpajakan (Elgharabawy & Aladwey, 2025). Akibatnya, ketika proporsi perempuan meningkat, keputusan terkait pajak tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh strategi ESG sebagai alat legitimasi, tetapi lebih didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan. Hal ini membuat hubungan antara ESG dan *tax avoidance* menjadi lebih lemah. Berdasarkan *stakeholder theory*, perempuan dalam dewan cenderung lebih memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah sebagai otoritas pajak. Dengan demikian, keputusan perusahaan menjadi lebih seimbang dan tidak berfokus pada efisiensi pajak semata. Hal ini mengurangi kemungkinan bahwa ESG digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga memperlemah hubungan keduanya. Dari sudut pandang *Legal Realism Theory*, meningkatnya proporsi direksi perempuan menggeser basis keputusan pajak dari ESG sebagai *soft law* simbolis menuju kepatuhan terhadap *hard law* yang lebih konkret, sehingga relevansi ESG dalam memengaruhi perilaku *tax avoidance* semakin melemah.

Variabel kontrol pada model ini menunjukkan hasil yang lebih kuat dibandingkan model pertama. *Return on Assets* (ROA) terbukti berpengaruh signifikan, mengonfirmasi bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih aktif melakukan *tax avoidance*. Variabel leverage pada model ini juga menunjukkan pengaruh yang signifikan setelah variabel BGD dan

interaksi ESG×BGD diikutsertakan dalam model kedua, mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam mengurangi praktik *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa ESG masih cenderung bersifat simbolis atau sebagai alat komunikasi dan legitimasi perusahaan kepada para pemangku kepentingan, dibandingkan diintegrasikan secara substantif dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Selain itu, *board gender diversity* terbukti memperlemah pengaruh ESG terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan direksi lebih berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kehati-hatian, serta konsistensi etika perusahaan daripada memperkuat efektivitas ESG dalam mengurangi praktik *tax avoidance*.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat teori legitimasi dan *stakeholder theory* yang menjelaskan bahwa implementasi ESG masih cenderung digunakan sebagai sarana memperoleh legitimasi perusahaan dibandingkan diintegrasikan secara substantif dalam kebijakan perpajakan. Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu mengimplementasikan ESG secara lebih konsisten dan terintegrasi dengan kebijakan perpajakan yang transparan, sementara regulator dan investor perlu lebih kritis dalam menilai pengungkapan ESG karena tingginya skor ESG belum tentu mencerminkan rendahnya praktik *tax avoidance* perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga penelitian yang akan datang diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan proksi alternatif dalam mengukur variabel *tax avoidance* maupun ESG, guna memperoleh hasil pengukuran yang lebih komprehensif dan representatif, memperluas cakupan sampel dan periode penelitian, serta mempertimbangkan variabel lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, perusahaan diharapkan tidak hanya menjadikan ESG sebagai sarana legitimasi, tetapi juga mengintegrasikannya secara substantif dalam kebijakan operasional dan pengambilan keputusan perpajakan guna mendukung praktik pengelolaan perusahaan yang lebih etis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Azzahra, Q. (2025). *Shortfall Pajak 2024 Jadi Alarm Capai Target Penerimaan 2025*. Tirto.Id. <https://tirto.id/shortfall-pajak-2024-jadi-alarm-capai-target-penerimaan-2025-g7eH>
- Bakar, A. B. S. A., Ghazali, N. A. B. M., & Ahmad, M. B. (2019). Sustainability Reporting and Board Diversity in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(2), 91–99. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i2/5663>
- Bird, R., & Davis-Nozemack, K. (2018). Tax Avoidance as a Sustainability Problem. *Journal of Business Ethics*, 151(4), 1009–1025. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3162-2>
- Buallay, A., Fadel, S. M., Alajmi, J., & Saudagaran, S. (2020). Sustainability reporting and bank performance after financial crisis: Evidence from developed and developing countries. *Competitiveness Review*, 31(4), 747–770. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2019-0040>
- Dong, Y., Liang, C., & Wanyin, Z. (2023). Board diversity and firm performance: impact of ESG activities in China. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 36(1), 1592–1609. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2090406>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2019). When does tax avoidance result in tax uncertainty? *Accounting Review*, 94(2), 179–203. <https://doi.org/10.2308/accr-52198>
- Elgharabawy, A., & Aladwey, L. M. A. (2025). ESG performance, board diversity and tax avoidance: empirical evidence from the UK. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, January. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2024-0177>
- Faisol, & Sujianto, A. eko. (2020). *Aplikasi Penelitian Keuangan dan Ekonomi Syariah dengan Stata*. Cahaya Abadi.
- Global Reporting. (2021). A Short Introduction To the GRI Standards. *GRI Standards*, 1–6. <https://www.globalreporting.org/media/wtafl4tw/a-short-introduction-to-the-gri->

- standards.pdf
- Kalalo, F. P., & Watulingas, R. R. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghindaran Pajak Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lex Crimen*, *XI*(2).
- Kolsi, M. C., Al-Hiyari, A., & Hussainey, K. (2023). Does environmental, social, and governance performance mitigate earnings management practices? Evidence from US commercial banks. *Environmental Science and Pollution Research*, *30*(8), 20386–20401. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23616-2>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2021). CSR and tax avoidance: A review of empirical research. *Corporate Ownership and Control*, *18*(2), 20–39. <https://doi.org/10.22495/cocv18i2art2>
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku. <https://id1lib.org/book/5686381/2da729>
- Mayberry, M. A., & Watson, L. (2021). Is Corporate Social Responsibility Related to Corporate Tax Avoidance? Evidence from a Natural Experiment. *Journal of the American Taxation Association*, *Forthcoming*, 43(1).
- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. *Journal of Management and Governance*, *16*(3), 477–509. <https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3>
- Mitroulia, M., Chytis, E., Kitsantas, T., & Skordoulis, M. (2025). ESG Strategy and Tax Avoidance : Insights from a Meta-Regression Analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, *18*(9), 1–34.
- Muhammad Syukron, & Hafidz Muhammad Fahri. (2018). Pendekatan Regresi Data Panel untuk Pemodelan Jumlah Angkatan Kerja dan Penanaman Modal Luar Negeri terhadap PDRB Provinsi di Indonesia. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, *1*(2), 100–116.
- Ouni, Z., Mansour, J. Ben, & Arfaoui, S. (2020). Board/executive gender diversity and firm financial performance in Canada: The mediating role of environmental, social, and governance (ESG) orientation. *Sustainability (Switzerland)*, *12*(20), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su12208386>
- Ovonji-Odida, H. I. (2024). State of Tax Justice 2024. *Tax Justice Network*, November, 26.
- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Herliyani, E. (2023). MSME Taxpayer Morality and Awareness in Fulfillment of Obligations in Pandemic Times. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, *2*(1), 1–12. <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.1-12>
- Rachman, A. (2025a). *Ada Potensi Shortfall Pajak Rp112 , 4 T di 2025 ,.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250702064836-4-645437/ada-potensi-shortfall-pajak-rp1124-t-di-2025-ini-kata-dirjen-pajak>
- Rachman, A. (2025b). *Pertama dalam 4 Tahun, Pajak RI Shortfall Rp 56 Triliun.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250106111448-4-600980/pertama-dalam-4-tahun-pajak-ri-shortfall-rp-56-triliun>
- Rudyanto, A. (2025). Does tax disclosure in Global Reporting Initiative (GRI)-based sustainability reporting mitigate aggressive tax avoidance? Evidence from a developing country. *Journal of Global Responsibility*, *16*(1), 37–51. <https://doi.org/10.1108/JGR-05-2023-0077>
- Septianingsih, A. (2022). *PEMODELAN DATA PANEL MENGGUNAKAN RANDOM EFFECT MODEL UNTUK MENGETAHUI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.* *3*(3), 525–536.
- Singh, G., & Dwesar, R. (2022). Board Gender Diversity, Firm Performance and Firm Risk: a Literature Survey. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, *11*(3), 69–84. <https://doi.org/10.12775/cjfa.2022.014>
- Stefanie Lucy Wirawan, & Yuniarwati. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Barang Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, *27*(03), 318–337. <https://doi.org/10.24912/je.v27i03.879>
- Wildan, M. (2025). *Outlook Pemerintah : Penerimaan Pajak Bakal Shortfall Tahun Ini.* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1811838/outlook-pemerintah-penerimaan-pajak-bakal-shortfall-tahun-ini>
- Yoon, B., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance. *Sustainability*, *13*(12), 1–16.

Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>

Yusiana, E., & Yuniarwati. (2023). Yusiana dan Yuniarwati: Pengaruh Profitability, Leverage, dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V(4), 1796–1804.